

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi terutama banjir yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia.¹

Banjir merupakan peristiwa alam tetapi juga merupakan peristiwa sejarah. Hal ini dikarenakan ketika terjadi banjir, maka muncul respon dari masyarakat dan pemerintah. Respon ini kemudian diungkapkan dalam berbagai bentuk. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan banjir merupakan peristiwa sejarah yang unik, karena didalamnya juga muncul konflik kepentingan masyarakat.²

¹ “Potensi Ancaman Bencana”, Website <https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana> diakses pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 15.11 WIB.

² Restu Gunawan, “Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat. Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta Tahun 1911-1985”, *Disertasi*. Depok, 2008. hlm. 4.

Bencana banjir sering terjadi di wilayah perkotaan, dikarenakan kurangnya daerah resapan dan saluran air akibat banyaknya pembangunan gedung serta perumahan. Salah satu kota di Indonesia yang sering terjadi banjir ialah Kota Padang. Dalam riwayatnya Kota Padang telah mengalami beberapa kali banjir baik banjir besar maupun banjir dengan intensitas sedang. dikarenakan Kota Padang sering dilanda banjir, maka pemerintah kota melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengendalikan banjir. Upaya yang dilakukan sejalan dengan kebijakan yang tepat untuk mengatasi banjir di Kota Padang.³

Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatra dengan luas wilayah 694,96 km² yang terdapat 5 sungai besar dan 16 sungai kecil yang melalui kota ini. Kota Padang dalam perkembangannya mengacu kepada kota lama yang terletak di muara sungai Batang Arau dan perkembangan perluasan kota berdasarkan titik pusat kota lama tersebut.⁴ Padang adalah kota dengan kekerapatan hujan dan curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan Kota Padang rawan banjir. Dengan kondisi kota Padang yang rawan terhadap banjir, sehingga pemerintah Kota Padang membuat kebijakan dalam pengendalian banjir di Kota Padang.⁵

Banjir terjadi disebabkan karena air sungai yang melimpah atau air hujan yang tidak masuk ke sungai karena system drainase yang jelek. Pengelolaan banjir khususnya yang berkaitan dengan sungai telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1916. Pada tahun itu, telah dibangun pembuatan banjir

³ Jaka Hendra B., “Banjir Berulang, Perubahan Iklim Terus Hantui Masyarakat Kota Padang”, Website <https://www.mongabay.co.id/2021/11/30/banjir-berulang-perubahan-iklim-terus-hantui-masyarakat-kota-padang/> diakses pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 15.46 WIB.

⁴ Mentayani dkk, “Karakteristik dan Formasi Keruangan Kota-kota Berbasis Perairan di Indonesia” *Jurnal Arsitektur*, 2013, hlm. 71-82.

⁵ Benny Hidayat, “Memahami Bencana Banjir di Kota Padang dengan Content Analysis Artikel Berita” *Jurnal Teknik Sipil*, 2016, hlm. 261-262.

kanal untuk menghindari kawasan Pasar Mudik, Palinggam, dan Seberang Padang dari banjir. Sehingga program pengendalian banjir tersebut dilanjutkan hingga pada tahun 1992.⁶

Kebijakan pengendalian banjir yang dilakukan oleh Syahrul Udjud, Walikota ke- 10 yang menjabat sebanyak 2 periode dari tahun 1983 – 1988 dan tahun 1988 – 1993 adalah: Pada periode pertama Syahrul Udjud berfokus kepada kebersihan kota untuk mengatasi banjir. Salah satunya meningkatkan pembangunan riol sebagai tempat pembuangan air limbah rumah tangga pada beberapa kelurahan. Selain itu, juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar melaksanakan MCK (Mandi Cuci Kakus) pada tempatnya dengan menyediakan Kakus bagi setiap rumah.⁷

Pada periode Kedua, yakni tahun 1988-1993 selanjutnya Syahrul Udjud berfokus pada memelihara drainase. Pelaksanaan proyek drainase tersebut, meliputi pembangunan saluran primer dan saluran sekunder di beberapa kawasan diantaranya Bandar Jati, Bandar Olo, Bandar Gereja, dan Bandar Jalan Raden Saleh. Pada tahun 1989 panjang drainase yang telah dibangun adalah sepanjang 238,015 KM dengan rincian saluran primer 22,65 km, saluran sekunder 21,52 km, dan saluran tersier 190,93 km. Memelihara drainase tersebut juga sejalan dengan jaringan jalan untuk mengatasi genangan-genangan air dan banjir. Dana pembangunan drainase tersebut juga bersamaan dengan dana pengendalian banjir yang didapat melalui hibah bantuan dana Bank Dunia sebesar Rp. 200 Milyar.⁸

⁶ Isril Berd dkk, “Kajian Strategi Penanggulangan Bnajer di Kota Padang”, *Laporan Penelitian* (Bidang Pengembangan Penerapan Teknologi, 2004), hlm. 23.

⁷ Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, *Laporan Pendahuluan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK)*, (Padang : Pemerintah Daerah Padang, 1993), hlm. 39.

⁸ *Ibid*, hlm. 36.

Dalam mengatasi permasalahan banjir ini, beliau mengambil kebijakan dengan mendorong upaya pembangunan dan juga mendorong pusat untuk merealisasikan proyek pengendalian banjir di Kota Padang. Dengan begitu, dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan juga mengatasi dari bahaya banjir.⁹

Proyek yang diupayakan pada masa Walikota Syahrul Ujud ini memberikan dampak yang sangat besar dalam penanganan banjir atau genangan air di Kota Padang. Namun akibat terjadinya penggundulan hutan melalui penebangan liar dan perladangan dan juga pengerukan bahan galian diseluruh aliran sungai dan drainase dalam kota tidak mencukupi, maka efektifitas dari proyek tersebut belum terlihat optimal. Oleh karena itu, bagian utara Kota Padang juga menjadi rawan banjir.¹⁰

Selain memaksimalkan pembangunan riol dan drainase, pemerintahan Syahrul Ujud juga melanjutkan program pembangunan pengendalian banjir yang mana merupakan proyek strategis yang membebaskan Kota Padang dari bencana banjir dengan melakukan pelebaran tujuh batang sungai yang melintang di Kota Padang. Sungai-sungai tersebut, yaitu Sungai Batang Arau, Banjir Kanal, Sungai Jirak, Batang Kuranji, Sungai Belimbing, Sungai Laras dan Batang Air Dingin.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas maka penelitian ini akan mengkaji mengenai banjir di Kota Padang dengan kebijakan pemerintah daerah pada masa Walikota Syahrul Ujud. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui usaha atau upaya Syahrul Ujud dalam menanggulangi banjir yang terjadi di Kota Padang selama menjabat sebagai Walikota Padang. Dalam konteks

⁹ Alimah Ibtihal, "Kepemimpinan Walikota Syahrul Ujud di Kota Padang Tahun 1983-1993" *Skripsi*, 2021, hlm. 60.

¹⁰ Isril Berd dkk, *op.cit.*, hlm. 24.

tersebut, maka penulisan skripsi ini diberi judul **“Penanggulangan Banjir di Kota Padang Masa Walikota Syahrul Ujud 1983-1993”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Fokus kajian ini adalah penanggulangan banjir di kota Padang tahun 1983-1993. Kota Padang pada masa kepemimpinan Syahrul Ujud sering kali terjadi banjir dikala musim hujan. Dengan begitu, Syahrul Ujud dengan kebijakannya membangun sebuah proyek pengendalian banjir di Kota Padang. Untuk mengarahkan penelitian ini, maka dirumuskanlah beberapa pertanyaan, yakni sebagai berikut:

1. Mengapa proyek pengendalian banjir menjadi prioritas kebijakan Walikota Syahrul Ujud?
2. Bagaimana kebijakan Walikota Syahrul Ujud dalam pengendalian banjir di Kota Padang?
3. Bagaimana Walikota Syahrul Ujud bisa mendapatkan dana untu proyek pengendalian banjir?

Batasan spasial dalam penelitian ini berada di bagian wilayah Kota Padang. Sedangkan, batasan temporal penelitian ini tahun 1983 – 1993. Alasan membatasi pengambilan tahun 1983 sebagai batasan awal karena pada tahun tersebut merupakan awal periode kepemimpinan Walikota Syahrul Ujud di Kota Padang. Sementara itu, alasan pengambilan tahun 1993 sebagai batasan akhir karena berakhirnya periode kepemimpinan Syahrul Ujud dan juga penyelesaian proyek pengendalian banjir yaitu revitalisasi pembangunan kanal yang dilakukan pada periode kepemimpinan Syahrul Ujud.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan keadaan Kota Padang sebelum dan sesudah dengan kebijakan pengendalian banjir di masa kepemimpinan Syahrul Ujud. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji proyek pengendalian banjir yang menjadi prioritas kebijakan Walikota Syahrul Ujud
2. Untuk mengkaji kebijakan Walikota Syahrul Ujud dalam pengendalian banjir di Kota Padang
3. Untuk membahas cara Walikota Syahrul Ujud mendapatkan dana untuk proyek pengendalian banjir

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh penjelasan serta gambaran mengenai kebijakan penanggulangan banjir di Kota Padang sehingga dapat menjadi suatu karya atau tulisan yang memberikan manfaat bagi pembaca. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bagian dari penulisan sejarah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi generasi yang akan datang dalam meneliti tema pembahasan yang serupa. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi koleksi kepustakaan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang penelitian ini dilakukan studi perpustakaan dalam mendukung atau hanya sekedar perbandingan dengan kajian sejenis. Di antara karya-karya yang mendukung tersebut adalah berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

Dalam buku yang disusun oleh Mardanas Safwan, Gusti Asnan, dkk yang berjudul *Sejarah Kota Padang*. Dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah kota Padang, dimulai dari kedatangan VOC ke Indonesia sampai masuk ke kota Padang, dan juga mengenai penduduk, dan struktur kota. Pada buku ini terutama pada bab 3 adalah membahas mengenai penampakan Kota Padang dari tahun setelah Indonesia merdeka.¹¹

Sumber selanjutnya adalah sebuah disertasi dari Eko Alvares Zaidulfar yang berjudul “Morfologi Kota Padang”. Dalam disertasinya menjelaskan mengenai keadaan atau perkembangan Padang dari masa VOC hingga abad ke-20. Selain itu, pada disertasi ini juga ada sebagian menjelaskan tentang pembuatan kanal yang bertujuan untuk mengurangi volume banjir yang terjadi di Kota Padang, dan juga untuk memperbesar kawasan yang bisa dikeringkan mengingat Kota Padang dulunya masih dipenuhi oleh hutan rawa.¹²

Selanjutnya Artikel dari Benny Hidayat yang berjudul “Memahami Bencana Banjir di Kota Padang dengan Content Analysis Artikel Berita”. Dalam jurnal Teknik Sipil membahas bahwa Kota Padang mempunyai tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir. Banjir bandang, atau disebut di daerah Padang sebagai galodo, adalah tipe banjir yang sangat merugikan. Hal ini terjadi karena tidak maksimalnya fungsi sistem drainase sebagai salah satu penyebab utama banjir di kota Padang.¹³

Buku yang ditulis oleh Mafri Amir dengan judul *Mengemas Kisah di Jalur Emas: 50 Tahun Pernikahan Syahrul Ujud dengan Rosmawar*, membahas tentang

¹¹ Safwan, Mardanas, dkk. *Sejarah Kota Padang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987).

¹² Eko Alvares Zaidulfar, “Morfologi Kota Padang” *Disertasi*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002).

¹³ Benny Hidayat, “Memahami Bencana Banjir di Kota Padang dengan Content Analysis Artikel Berita” *Jurnal Teknik Sipil*, 2016, hlm. 261.

perjalanan hidup dan testimoni berbagai pihak terhadap Syahrul Ujud bersama sang istri Rosmawar. Buku ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya bagian pertama menceritakan tentang perjalanan hidup Syahrul Ujud ketika menjadi jaksa di Talu hingga menjadi Staf Khusus Wakil Presiden RI, bagian kedua menceritakan kisah kasih Syahrul Ujud ketika menjadi jaksa dengan Rosmawar seorang guru SGA, bagian ketiga merupakan testimoni dari berbagai tokoh seperti Azwar Anas, Basril Djabar, Shofwan Karim dan lain-lain, bagian keempat adalah testimoni dari keluarga, dan bagian kelima berisi testimoni dari media sosial.¹⁴

Laporan dokumentasi yang ditulis oleh Departemen Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berjudul “Pengendalian Banjir Kota Padang” membahas mengenai proyek pengendalian banjir di Kota Padang yang seringkali dilanda banjir yang menimbulkan bencana banjir setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pesatnya perkembangan kota dan tumbuhnya permukiman baru. Dengan demikian, dengan adanya proyek ini bisa mengurangi banjir yang terjadi di Kota Padang.¹⁵

Sumber selanjutnya adalah Skripsi Alimah Ibtihal yang berjudul “Kepemimpinan Walikota Syahrul Ujud di Kota Padang Tahun 1983-1993”. Dalam skripsinya menjelaskan mengenai kepemimpinan walikota Syahrul Ujud dalam membangun Kota Padang dengan beberapa kebijakannya. Salah satunya kebijakan mengenai proyek pengendalian banjir di Kota Padang. Perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian ini adalah dalam skripsi ini hanya membahas secara singkat saja. Sedangkan pada penelitian ini lebih membahas secara luas, baik itu dari

¹⁴ Mafri Amir, *Mengemas Kisah Di Jalur Emas*,(Jakarta, 2017).

¹⁵ Departemen Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat, “Pengendalian Banjir Kota Padang”, *Laporan Dokumentasi*, Juli 1995.

permasalahan pembebasan lahan, kontraktor yang akan mengerjakan proyek tersebut, proses pembangunan banjir kanal, dan juga dampak dari pelaksanaan proyek tersebut. Selain itu, pada penelitian ini juga akan membahas tahap pengerjaan pada banjir kanal dan juga lama pengerjaan proyek tersebut.¹⁶

Sumber selanjutnya adalah sebuah disertasi dari Restu Gunawan yang berjudul "Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat: Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta Tahun 1911-1985". Dalam disertasinya menjelaskan bahwa banjir memang menjadi masalah besar di Jakarta sebagai kota metropolitan. Sejak zaman kolonial hingga saat ini, banjir belum teratasi secara memadai. Menjadi pusat perdagangan kolonial, populasi meningkat secara dramatis yang juga memperluas ukuran Jakarta. Peningkatan jumlah penduduk pada tahun 1948-1950 terjadi ketika ibu kota negara berpindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Setelah tahun 1970-an terjadi ledakan penduduk di Jakarta yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bangunan tidak bisa dihindari. Pembangunan kompleks perumahan, pusat perdagangan, dan industri bahkan telah dilakukan di daerah terlarang untuk setiap bangunan. Oleh karena itu, daerah banjir telah meningkat pesat. Meski pemerintah telah mengeluarkan banyak dana, banjir tak bisa dibendung. Banjir memang pekerjaan rumah yang sulit bagi pemerintah Jakarta.¹⁷

Selanjutnya Artikel dari Sarkawi B. Husain yang berjudul "Banjir, Pengendaliannya, dan Partisipasi Masyarakat di Surabaya, 1950-1976". Dalam jurnal Masyarakat dan Budaya menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di Surabaya

¹⁶ Alimah Ibtihal, "Kepemimpinan Walikota Syahrul Ujud di Kota Padang Tahun 1983-1993" *Skripsi*, 2021.

¹⁷ Restu Gunawan, "Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat: Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta Tahun 1911-1985" *Disertasi*. (Depok: Universitas Indonesia, 2008).

menunjukkan eskalasi dan bagaimana masyarakat Surabaya berupaya untuk menangani banjir. Salah satu faktor penyebab terjadinya banjir di Surabaya, yaitu meluapnya Kali Lamongan yang berhulu di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto. Untuk menanggulangi banjir tersebut, masyarakat melakukan upaya sendiri dengan meninggikan lantai rumahnya dan membuat tanggul di depan pintu rumahnya.¹⁸

Selanjutnya Artikel dari Nabila Amelia & Sarkawi B. Husain yang berjudul “Ketika Air Menggenangi Pemukiman: Banjir dan Penanggulangannya di Madiun, 1940-1989”. Dalam jurnal *Diakronika* mengkaji banjir yang melanda Madiun pada tahun 1940- 1989. Dalam jurnal ini, diketahui bahwa banjir di Madiun telah terjadi secara rutin jauh sebelum masa reformasi. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, tidak hanya kondisi alam, tetapi juga aktivitas manusia. Salah satu faktor dominan yang menjadi penyebab banjir adalah curah hujan. Selain curah hujan, banjir disebabkan karena adanya anak sungai Bengawan Solo, yakni Kali Madiun. Setiap tahun, terutama ketika musim hujan, Kali Madiun akan mendapat kiriman dari kawasan hulu beserta anak-anak sungainya, sehingga membuat air sungai meluap. Akibat banjir yang rutin terjadi, penduduk Madiun mengalami kerugian, baik material, finansial, maupun korban jiwa.¹⁹

Berdasarkan studi kepustakaan tersebut diatas sudah banyak dilakukan penelitian tentang banjir di Kota Padang. Masing-masing permasalahan yang diteliti memiliki karakteristiknya tersendiri, demikian juga halnya dengan banjir di Kota Padang Masa Walikota Syahrul Ujud. Oleh karena itu, penelitian tentang

¹⁸ Sarkawi B. Husain, “Banjir, Pengendaliannya, dan Partisipasi Masyarakat di Surabaya, 1950-1976” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol.18 No. 1 Tahun 2016, hlm. 65.

¹⁹ Nabila Amelia & Sarkawi B. Husain, “Ketika Air Menggenangi Pemukiman: Banjir dan Penanggulangannya di Madiun, 1940-1989” *Jurnal Diakronika*, Vol. 22 No. 02 Tahun 2022, hlm. 147.

banjir di Kota Padang Masa Walikota Syahrul Ujud menarik dan perlu untuk ditulis. Hal ini dikarenakan mengandung aspek kebaruan dan originalitas yang membedakan dengan kajian terdahulu.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini berkaitan dengan persoalan kepemimpinan yang merupakan sebuah proses pengaruh satu arah atau timbal balik untuk mencapai ketaatan. Kepemimpinan ini bisa saja difokuskan pada satu individu.²⁰ Dalam hal ini dikaitkan pada kepemimpinan Syahrul Ujud yang menjabat sebagai Walikota Kota Padang tahun 1983-1993 yang memusatkan perhatian terhadap penanggulangan banjir di Kota Padang.

Kebijakan merupakan usaha dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Kebijakan juga dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.²¹ Penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap penanggulangan banjir dalam kebijakan pemerintahan Kota Padang.

Banjir merupakan tanah tergenang akibat luapan sungai, yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, yang berkisar antara 2000-

²⁰ Kuper Adam, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Penerjemah Haris Munandar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

²¹ Desrinelti, dkk “Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan” *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 84.

3000 mm / tahun, sehingga banjir mudah terjadi selama musim hujan, yang antara bulan Oktober sampai Januari.²²

Secara umum, banjir disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor dari aktifitas manusia dan faktor kondisi alam. Aktifitas manusia yang menyebabkan terjadinya banjir, yaitu adanya pemukiman baru di daerah bantaran sungai, pembuangan sampah dialiran sungai dan saluran drainase, perubahan tata guna lahan untuk bangunan. Sedangkan banjir disebabkan oleh kondisi alam, berupa curah hujan yang tinggi, aliran anak sungai tertahan oleh aliran induk sungai, dan pembendungan muara sungai akibat air pasang surut.²³ Hal ini juga terjadi di Kota Padang, dimana penyebab banjirnya ialah aktifitas manusia dan kondisi alam terutama disaat curah hujan tinggi.

Secara umum dampak banjir dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung relative lebih mudah diprediksi dari pada dampak tidak langsung. Dampak yang dialami oleh daerah perkotaan dimana didominasi oleh permukiman penduduk juga berbeda dengan dampak yang dialami daerah perdesaan yang didominasi oleh areal pertanian. Banjir yang menerjang suatu kawasan dapat merusak dan menghancurkan rumah sehingga menimbulkan korban luka - luka maupun meninggal. Banjir juga dapat melumpuhkan transportasi umum atau membuat rute menjadi lebih jauh untuk bisa mencapai tujuan karena menghindari titik genangan air. Juga banyak petambak di pesisir yang terancam bangkrut karena tambaknya rusak terendam banjir. Selain berdampak

²² Aprilia Findayani “Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kota Semarang” *Jurnal Geografi*, Vol. 12 No. 1 Januari 2015, hlm. 104.

²³ Aprizon Putra, dkk “Analisa Bencana Banjir di Kota Padang (Studi Kasus Intensitas Curah Hujan Kota Padang 1980-2009 dan Aspek Geomorfologi)” *Makalah Pada Seminar Sains Atmosfer*, 2013, hlm. 25.

pada bangunan juga berdampak pada kesehatan manusia dengan timbulnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dll. Bukan hanya dampak fisik yang diderita oleh masyarakat tetapi juga kerugian non-fisik seperti sekolah diliburkan, harga barang kebutuhan pokok meningkat.²⁴

Umumnya masalah banjir disebabkan oleh; a) akibat dari aktifitas manusia, berupa; 1) timbulnya pemukiman baru di daerah bantaran sungai, 2) perubahan tataguna lahan baik di daerah hulu maupun hilir, 3) kurangnya pemeliharaan bangunan pengendalian banjir, 4) pembuangan sampah di saluran drainase, 5) kerusakan hutan di daerah hulu, dan 6) pemadatan serta penutupan permukaan tanah oleh bangunan. Sedangkan b) akibat dari kondisi alam, berupa; 1) curah hujan yang tinggi, 2) aliran anak sungai tertahan oleh aliran induk sungai atau back water, dan 3) pembendungan muara sungai akibat air pasang surut.

Menanggulangi banjir tak dapat dilakukan oleh pemerintah saja atau orang perorang saja. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak untuk menghindarkan Kota Padang dan kota lain di Indonesia dari banjir besar. Meningkatnya masalah banjir merupakan salah satu dampak negatif dari kebijakan pembangunan yang sampai saat ini lebih mementingkan aspek pertumbuhan ekonomi dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan sangat kurang. Untuk mengatasi banjir saat ini masih mengandalkan upaya yang berupa rekayasa sungai maupun kanal yang mempunyai keterbatasan dalam menampung debit air yang berlebihan.²⁵

²⁴ Arief Rosyidie, "Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 24 No. 3, Desember 2013, hlm. 246-247.

²⁵ Pahrul Razikin, dkk, "Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 31.

Pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitas. Pertumbuhan penduduk meningkat seiring dengan meningkatnya pemenuhan kebutuhan penduduk tersebut.²⁶ Pertumbuhan penduduk memegang peranan dalam menentukan kesejahteraan manusia.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk ini, maka pemukiman penduduk pun semakin luas sehingga lahan untuk pembuatan rumah pun semakin banyak dan lahan untuk aliran air pun semakin sempit atau bisa juga tidak ada lahan untuk aliran air. Hal inilah yang menyebabkan banjir karena tidak adanya lahan saluran air.

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis data peninggalan masa lalu. Dalam metode sejarah terdapat empat tahapan yaitu Heuristik (metode pengumpulan sumber data dan bahan), Kritik (pengujian data dan bahan yang telah dikumpulkan), Interpretasi (penafsiran), dan Historiografi (penulisan).²⁷

Pertama, tahapan heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber baik sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa arsip-arsip yang diperoleh dari kantor Pekerjaan Umum (PU) Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Dokumen terbitan pemerintah didapatkan di Kantor Kearsipan Kota Padang dan Kantor Badan Pusat Statistik Kota Padang. Sedangkan untuk sumber lisan berupa wawancara dengan masyarakat

²⁶ Imelda Hutasoit, *Pengantar Ilmu Kependudukan* (Jakarta : Alfabeta), hlm.7.

²⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32.

yang terkena banjir, dan pegawai Dinas Kebersihan Kota Padang yang dikenal dengan pasukan orange.

Sumber sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data baik dari buku, skripsi, maupun dari artikel jurnal. Sumber buku dan skripsi didapatkan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dan Perpustakaan Kota Padang. Sumber surat kabar didapatkan di Kantor Kearsipan Kota Padang dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Kedua, kritik yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah terdapat dua cara melakukan kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah.²⁸ Fungsi dari kritik eksternal memeriksa sumber sejarah terhadap keotentikan dan integritasnya data tersebut. Sedangkan kritik internal lebih menekankan aspek isi atau kesaksian dan data yang telah dikumpulkan sejarawan.

Ketiga, interpretasi atau penafsiran. Penafsiran ini merupakan salah satu dari tiga bentuk teknis dasar dalam penulisan sejarah yaitu deskripsi, narasi dan analisis. Sejarawan yang berorientasi pada sumber sejarah saja akan menggunakan porsi deskripsi narasi yang lebih banyak sedangkan sejarawan yang berorientasi kepada permasalahan selain menggunakan deskripsi dan narasi akan lebih mengutamakan analisis.²⁹

²⁸ Heliussjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm 104.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

Keempat, historiografi atau penulisan sejarah secara menyeluruh. Dalam penulisan sejarah wujud dari historiografi itu merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan yang sampai kepada atau dibaca oleh para pembaca dan pemerhati sejarah. Terdapat tiga cara pemaparan atau penyajian sejarah yaitu deskriptif-naratif, sejarah analitis-kritis dan gabungan deskriptif-naratif dan analitis-kritis. Menulis sejarah tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan tetapi juga dibutuhkan kemampuan menganalisis data untuk menghasilkan data yang otentik dari seluruh hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang berjudul Perbandingan Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Padang Masa Walikota Syahrul Ujud Tahun 1983-1993 ini mencakup empat bab. Setiap bab akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

Bab I pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah dari tema penelitian, batasan dan perumusan masalah, tujuan melakukan penelitian, tinjauan pustaka yang memaparkan tentang studi relevan, dan kerangka analisis berdasarkan tema penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II banjir di Kota Padang membahas tentang keadaan Kota Padang terutama wilayah yang selalu rawan banjir.

Bab III kebijakan penanggulangan banjir di Kota Padang membahas mengenai upaya Walikota Syahrul Ujud dalam pengendalian banjir di Kota Padang dengan membuat kebijakan pengendalian banjir di Kota Padang agar banjir tidak mengena Kota Padang.

Bab IV dampak kebijakan penanggulangan banjir di Kota Padang membahas mengenai dampak dari kebijakan pengendalian banjir tersebut, yang mana membuat masyarakat mengalami dampak dari pembangunan tersebut baik secara ekonomi-sosial masyarakat maupun terhadap pengendalian banjir itu sendiri. Terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar proyek tersebut yang mana ada diantara mereka yang kehilangan tanah, rumah, maupun sawah yang terkena atas proyek pembangunan tersebut.

Bab V kesimpulan berisikan tentang temuan dari penelitian ini yang merangkum seluruh pembahasan-pembahasan dalam penulisan.

